

**MASIH RENDAHKAH PARTISIPASI WANITA INDONESIA DALAM  
PEMBANGUNAN NEGARA?**

**WHAT INDONESIA LADIES PARTICIPATED DEVELOPING THEIR  
COUNTRY WAS STILL LOW?**

**Priyono**

**FAKULTAS PERTANIAN DAN PSLK  
UNIVERSITAS SLAMET RIYADI SURAKARTA**

**ABSTRACT**

*Human right or emancipation of men and women in Indonesia is the same. But many applicatings often occur many differences. Because many problems or many factors have affected them.*

*Those many factors i.e : gender problem, the employment, social-culture, etc. Although many womans work profesional on the job, namely director of many factories, the head of district, many rectors, many vice rectors or many deans of universities, ministry or president on their country, etc. But now everyone still ask about participating many womans to develop on their country or state development? Or think still low?*

*Key words : Human right or emancipation, women participating, state development.*

**PENDAHULUAN**

Pembangunan suatu negara (termasuk Indonesia) pada hakekatnya adalah pembangunan merata untuk seluruh rakyat dan seluruh wilayah negara. Berarti dari sini menunjukkan bahwa pembangunan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya (SDM) maupun pembangunan wilayah (sarana prasarana) dengan kemudi oleh pemerintah. Meskipun dalam pelaksanaannya dapat dilaksanakan secara bertahap tetapi harus terpadu dan bersinergi antara kebutuhan negara (Pemerintah) dan rakyatnya (manusia) beserta lingkungannya.

Sehubungan dengan itu jika diperhatikan baik SDM pria dan SDM wanita mempunyai kedudukan yang sama dalam hal sebagai subyek dan obyek pembangunan. Pembangunan yang dimaksud dapat berupa pembangunan SDM (pendidikan jasmani dan rohani/spiritual) maupun pembangunan sarana dan prasarana wilayah (termasuk sumber daya alam/ekonomi). Hal ini sebenarnya dasar hukumnya sudah ada dan jelas, yakni UUD 1945 : a) pasal 27 (2) berbunyi : "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan", b) pasal 29 (2) berbunyi : "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu", pasal 31 (1) berbunyi : "Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran", pasal 31 (2) berbunyi : "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang ", pasal 33 (1) berbunyi : "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan", pasal 33 (3) berbunyi : "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuranrakyat". Bahkan pada masa

pemerintahan orde baru telah ditetapkan lebih jelas dalam GBHN 1998 yang mengatur tentang kedudukan dan peranan wanita dalam pembangunan adalah sejajar dan sama dengan pria. Demikian pula masa pemerintahan reformasi sekarang ini kedudukan dan peranan wanita di bidang pendidikan organisasi, pemerintahan dan swasta jumlahnya masih di bawah pria, walaupun sebenarnya ada beberapa wanita yang sudah menonjol menjadi bupati, kepala bagian suatu instansi, duta besar, jenderal TNI/Polri, menteri, direktur utama perusahaan swasta, bahkan presiden.

Hal ini memang ironis, bahwa penduduk Indonesia umlah wanita lebih banyak ( $\pm 53\%$ ) dari pada jumlah prianya, disamping itu menurut GDI (Gender Development Index) dan GEM (Gender Empowerment Measure) yang tertera dalam HDRUNDP menunjukkan dalam mkurun waktu 10 tahun (1990 – 2000) usia harapan hidup rata-rata wanita (66,1 tahun) lebih tinggi dari pria (62,5 tahun), sedangkan data pendidikan, data pekerja professional dan teknis, pendapatan serta status pekerjaan wanita di bawah pria. Data tersebut adalah untuk tingkat pendidikan SD (pria : wanita = 50,83 % : 49,17 %), tingkat SLTP (pria : wanita = 53,66 % : 46,34 %); tingkat SLTA (pria : wanita = 58,57 % : 41,43 %) : PT (pria : wanita = 66,40 % : 33,60 %). Jumlah pekerja professional dan teknis (pria : wanita = 58,70 % : 41,30 %). Pendapatan (pria : wanita = 66,98 % : 33,02 %). Selanjutnya perbandingan status pekerjaan antara pria dan wanita sebagai berikut :

- a. Sebagai pekerja sendiri tanpa bantuan orang lain ( pria : wanita = 67,6 % : 32,4 %).
- b. Sebagai usahawan di Bantu anggota keluarga/buruh tidak tetap (pria : wanita = 78,1 % : 21,9 %)
- c. Usahawan dengan buruh tetap (pria : wanita = 78,9 % : 21,1 %)
- d. Pekerja/buruh/karyawan (pria : wanita = 67,2 % : 73,9 %).

Kondisi di Indonesia ini disebabkan oleh adanya pandangan yang masih bersifat primordial, disamping secara umum yang dialami kebanyakan negara-negara berkembang. Pandangan bersifat primordial meremehkan wanita tersebut antara lain:

- a). Kultur yang diwarisi jaman Belanda (khususnya di Pulau Jawa) masih terasa, bahwa wanita tidak perlu berpendidikan tinggi karena wanita nanti hidupnya menjadi tanggungan pria atau wanita lebih baik sebagai ibu rmah tangga mengasuh anak-anak. Sebaliknya pria didorong terus untuk melanjutkan studi sampai yang tertinggi, karena diharapkan pria dapat diandalkan untuk dapat melanjutkan tanggung jawab orang tuanya.
- b). Wanita dianggap lebih lemah dari pada pria.
- c). Penafsiran dan keyakinan terhadap agama (khususnya Islam?) yang kurang komprehensif/dalam yang menganggap wanita tidak boleh menjadi pemimpin tertinggi. Sedangkan kondisi yang secara umum dialami oleh kebanyakan negara berkembang (termasuk Indonesia) karena pendidikan memerlukan biaya yang tidak sedikit (mahal) dan akses promosi yang bagus, sehingga kondisi ini akhirnya memungkinkan pria lebih berpeluang untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi yang sekaligus memungkinkan untuk memperoleh lebih banyak kesempatan bekerja dan dapat memilih job yang diinginkan. Selanjutnya menurut Azkiyah(2002), bahwa selain factor pedidikan ada factor lain yang dapat mempengaruhi perolehan pekerjaan dan posisi yang lebih bagus, yaitu factor lapangan pekerjaan, pengalaman kerja, dan relasi/kolega telah terbukti cukup banyak berpengaruh.

Namun jika disimak masih terdapat variasi tentang perbandingan pendidikan dan pekerjaan wanita dengan pria, yaitu jika di daerah perkotaan perbandingannya

lebih sempit, sedangkan di luar perkotaan lebih lebar. Demikian pula di pulau Jawa perbandingan lebih sempit sedangkan di luar pulau Jawa lebih lebar.

Akibat adanya pandangan yang menganggap rendah wanita tersebut telah menggugah/memunculkan para aktivis perempuan dan penegak HAM untuk terus memperjuangkan perlakuan diskriminatif terhadap perempuan atau memperjuangkan tentang persamaan hak di segala bidang dengan pria tanpa meninggalkan kodratnya sebagai wanita penghasil generasi.

Perjuangan tersebut telah didukung oleh PBB melalui Konferensi Internasional Tahunan Perempuan (Conference of The International Woman's Year) tahun 1975 di Mexico dan Dekade untuk Perempuan (Decade for Woman) tahun 1976 – 1985, serta Pedoman Aksi Beijing (The Beijing Platform for Action) tahun 1995 di Beijing RRC dengan mencetuskan bahwa "pendidikan akan mentransformasikan perempuan dari sifat partisipan dan resifien pasif menjadi aktor sekaligus konsumen aktif dalam proses pembangunan".

Pandangan ini sebenarnya mengharapkan bahwa pendidikan perempuan mampu mengeliminir dampak negatif dari pembangunan ekonomi atau paling tidak bisa menambah akses perempuan terhadap pasar kerja, memperbaiki keahlian, menaikkan potensi penghasilannya dan merubah pandangan perempuan terhadap peran tradisionalnya dalam rumah tangga dan dunia kerja.

Selain itu kesempatan pendidikan dan memperoleh pekerjaan bagi wanita Indonesia terbuka luas (Inpres No. 9 tahun 2000) dan semakin tahun menunjukkan kemajuan walaupun hasilnya masih tetap berada di bawah kaum pria

#### **KEDUDUKAN, PERANAN WANITA DAN KENDALANYA**

Kedudukan dan peranan wanita Indonesia sangat penting dalam memperjuangkan haknya agar sejajar sama dengan pria, yaitu sejak masa pra kemerdekaan (pergerakan, perjuangan merebut kemerdekaan), masa kemerdekaan hingga masa pembangunan dan reformasi sekarang ini. Artinya menuntut agar dapat mengerjakan pekerjaan sesuai / seperti yang dikerjakan kaum pria, baik dalam hal urusan pembelaan negara/pemerintahan, pendidikan, social budaya, keagamaan dan lain-lain. Berkaitan dengan ini telah muncul berbagai tokoh nasional dari wanita seperti RA. Kartini, Dewi Sartika, Cut Nyak Dien, Hj. Rasuna Said, Liasih Sutanto, Mien Sugandhi, Pratiwi Sudarmono, Tuti Alawiyah, Marwah Daud, Miranda Goeltom, Khofifah Indar Parawansa, Sri Mulyani Indrawati, Megawati Sukarno Putri, dan sebagainya.

Munculnya tokoh-tokoh wanita tersebut telah menunjukkan sebenarnya kemampuan wanita dapat menyamai bahkan melebihi kaum pria atau kedudukan dan peranannya dapat sejajar / sama dengan kaum pria. Namun ironisnya sampai sekarang rata-rata kehidupan wanita masih di bawah pria, walaupun sebenarnya sekarang jumlah penduduk wanita lebih besar dari pada pria. Keadaan seperti ini disebabkan oleh :

- a. Pandangan primordial yang merendahkan arti wanita (Rajab 2002)
- b. Kondisi sebagian besar (umumnya) yang dialami oleh negara-negara sedang berkembang yang masih miskin baik modal, iptek maupun informasi (Finlayson dan Nazaroo, 1998).

Pandangan primordial yang menganggap rendah wanita antara lain :

1. Kultur yang terjadi sejak jaman Belanda (khususnya di pulau Jawa) masih kerap terasa, yaitu menganggap wanita tidak boleh/perlu berpendidikan tinggi, karena hidupnya nanti menjadi tanggungan suami atau hanya berfungsi sebagai ibu rumah

tangga untuk melahirkan dan mengasuh anak-anak. Sebaliknya kaum pria didorong terus untuk melanjutkan pendidikan atau jika orang tua kurang mampu cara yang dilakukan anak-anak prianya dididik dengan berbagai ketrampilan sebagai bekal untuk hidup mandiri setelah lepas dari orang tua sedangkan anak wanitanya hanya dididik untuk membantu orang tua (ibu) tentang pekerjaan di rumah. Namun pandangan seperti ini sudah banyak yang berubah dan jika ada masih terasa di daerah pelosok (pedesaan) atau kantong kemiskinan.

2. Wanita dianggap lemah dari pada pria baik mental maupun fisiknya.
3. Penafsiran dan keyakinan terhadap agama (terutama Islam ?) yang kurang komprehensif/mendalam sehingga menganggap wanita tidak boleh menjadi pemimpin tertinggi.
4. Sering terjadi adanya perlakuan kasar terhadap wanita-wanita seperti perkosaan atau penganiayaan dan sebagainya. Sedangkan kondisi yang secara universal diderita negara-negara sedang berkembang (termasuk Indonesia), karena pendidikan memerlukan biaya tinggi dan akses promosi yang baik sehingga keadaan demikian lebih memungkinkan kaum pria berpeluang besar untuk melanjutkan pendidikan lebih tinggi yang sekaligus lebih berpeluang dalam mendapatkan dan memilih pekerjaan yang diinginkan.
5. Wanita dipandang tak perlu kerja keras.

#### **PENINGKATAN PERANAN WANITA DAN KEDUDUKANNYA**

Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Pendidikan Nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan Nasional. Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya.

Jenjang pendidikan adalah jalur pendidikan yang terdiri dari : pendidikan dasar (6 tahun di SD + 3 tahun di SLTP = 9 tahun), pendidikan menengah (3 tahun di SLTA) dan pendidikan tinggi (Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut dan Universitas). Pendidikan dasar diselenggarakan untuk mengembangkan sikap dan kemampuan serta memberikan pengetahuan dan ketrampilan dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat serta mempersiapkan peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan menengah. Pendidikan menengah diselenggarakan untuk melanjutkan dan meluaskan pendidikan dasar serta menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan social, budaya dan alam sekitar serta dapat mengembangkan kemampuan lebih lanjut dalam dunia kerja atau pendidikan tinggi. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan dan pendidikan kaagamaan. Pendidikan tinggi merupakan kelanjutan pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian. Suatu pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi disebut perguruan tinggi yang dapat berbentuk Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut atau Universitas. Pendidikan akademi atau professional diselenggarakan oleh Universitas, Sekolah Tinggi dan Institut. Pendidikan profesional dilaksanakan oleh Akademi atau Politeknik.

Kedudukan dan peranan wanita sangat penting sejak pergerakan kemerdekaan, masa kemerdekaan hingga masa pembangunan dan reformasi ini. Yakni ditandai munculnya beberapa tokoh nasional wanita, seperti RA. Kartini, Dewi Sartika, Hj. Rasuna Said, Lasiah Sutanto, Mien Sugandhi, Pratiwi Sudarmono, Marwah Daud, Khofifah Indra Parawansa, Megawati Sukarno Putri dan sebagainya yang kesemuanya telah teruji di bidang pendidikan (formal dan informal atau ditambah non formal) maupun organisasi. Namun sampai sekarang jumlah peserta didik, jumlah pekerja, jumlah pendapatan wanita masih di bawah kaum pria.

Melihat substansi di atas, bahwa pendidikan sangat penting dan bermanfaat bagi peningkatan kualitas wanita untuk memperoleh dan meningkatkan mutu pekerjaannya yang pada akhirnya dapat sejajar dan sama dengan kaum pria.

Upaya penempatan kelayakan kedudukan dan peranan wanita yang layak, sebanding, sejajar dan seimbang dengan pria. Upaya ini tentunya dengan melalui berbagai cara yaitu pembuatan seperangkat peraturandan tindakan nyata dalam mengangkat harkat dan martabat wanita yang sama dan sejajar kedudukan serta peranannya sama seperti pria.

Peraturan-peraturan yang dibuat di Indonesia masih cukup banyak dijumpai dalam pelaksanaannya belum sesuai bahkan ada peraturan yang justru kurang menyentuh kepentingan wanita. Sebenarnya peraturan yang dibuat di Indonesia telah mempunyai payung yang kokoh (tersebut di atas dalam bab pendahuluan) yaitu UUD 45 seperti pasal 27(2), pasal 29(2), pasal 31(1)&(2), pasal 33(1)&(2). Bahkan pada masa pemerintahan orde baru telah ditetapkan lebih jelas dalam GBHN 1988 yang mengatur tentang kedudukan dan peranan wanita dalam pembangunan adalah sejajar dan sama dengan peranan pria.

Penjabarannya dalam pokok-pokok kebijaksanaan GBHN tersebut mengenai pengembangan dan peningkatan peranan wanita antara lain:

- 1). Wanita baik sebagai warga negara maupun sebagai sumber insani bagi pembangunan mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang sama dengan pria disegala bidang kehidupan bangsa dan dalam segenap kegiatan pembangunan. Berkaitan dengan itu kedudukan dan peranan wanita perlu terus ditingkatkan serta diarahkan sehingga dapat meningkatkan partisipasinya dan memberikan kontribusi yang sangat besar bagi pembangunan bangsa dan negara sesuai kodrat, harkat dan martabat wanita.
- 2). Peranan wanita dalam pembangunan berkembang selaras dan serasi dengan perkembangan tanggung jawab dan peranannya dalam mewujudkan dan mengembangkan keluarga sehat sejahtera dan bahagia (termasuk pembinaan anak/generasi baik jasmani dan rohani sebagai tunas bangsa calon pemimpin masa depan).
- 3). Kemampuan wanita perlu terus dikembangkan dalam rangka meningkatkan peranan dan tanggung jawabnya dalam pembangunan melalui peningkatan pengetahuan dan ketrampilan (IPTEK), terutama untuk lebih dapat memanfaatkan kesempatan kerja diberbagai bidang. Sejalan dengan itu perlu dikembangkan iklim sosial budaya yang lebih memungkinkan wanita untuk makin berperan dalam pembangunan.

Demikian pula pada masa pemerintahan reformasi sekarang ini kedudukan wanita telah dibuka luas untuk semua lini melalui surat keputusan presiden tentang Inpres no.9/2000. Namun demikian untuk bidang strategis seperti pendidikan, organisasi sospol, pemerintahan, hankam, dan swasta jumlahnya masih dibawah pria, walaupun sebenarnya ada beberapa wanita yang berprestasi dan menonjol menjadi pimpinan daerah, kepala bagian/dinas instansi, duta besar, menteri, jenderal TNI/Polri, direktur utama perusahaan, bahkan ada yang menjadi presiden. Kenyataan ini memang ironis sekali, bahwa sebenarnya sekarang ini jumlah penduduk wanita Indonesia lebih banyak ( $\pm$  53 %) daripada pria, jatah kursi wakil rakyat

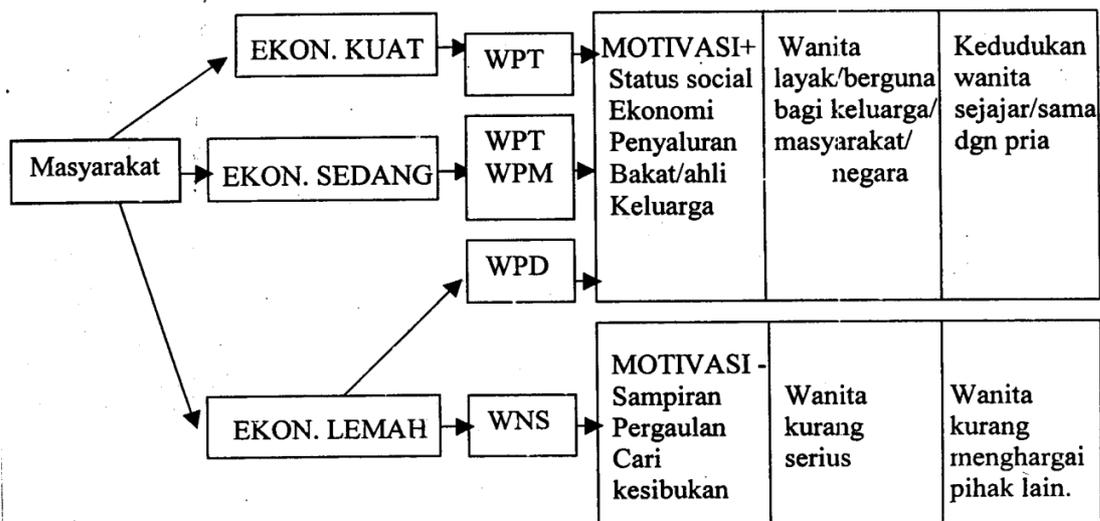
masih jauh daripada pria walaupun presidennya wanita. Selain itu menurut GDI (Gender Development Index) dan GEM (Gender Empowerment Measure) yang tertuang dalam HDRIUNDP menunjukkan dalam kurun waktu 10 tahun (th 1990-2000) usia harapan hidup rata-rata wanita (66,1 th) lebih tinggi daripada pria (62,5 th), sedangkan data pendidikan, data pekerja profesional dan teknis, pendapatan serta status pekerjaan wanita dibawah pria. Perbandingan tingkat pendidikan antara pria dan wanita masing-masing tingkat SD =50,83%:49,17; tingkat SLTP=53,66%:46,34%; tk SLTA=58,57%:41,43%; tk PT=66,40%:33,60%. Pendapatan=66,98%:33,02%. Selanjutnya perbandingan status pekerjaan antara pria dan wanita sbb: a) Sebagai pekerja mandiri/tanpa bantuan orang lain=67,6%:32,4%; b) Usahawan dg bantuan keluarga/buruh tak tetap=78,1%:21,9%; c) Usahawan dg buruh tetap=78,9%:21,1%; d) Pekerja atau karyawan/buruh=67,2%:73,9%.

Ada perkembangan yang menarik khususnya lulusan D1 dan D2 perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Karena pada bidang ini banyak menawarkan program pendidikan praktis dan singkat, sehingga wanita cocok sekali untuk segera menggunakannya. Namun lulusan lainnya baik tingkat SD s/d Perguruan Tinggi masih saja didominasi pria. Walaupun sebenarnya upaya-upaya dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat wanita terus dilakukan baik dalam bentuk pembuatan aturan seperti UUD 45, GBHN, Inpres dll serta perbaikan bidang kurikulum sekolah atau penataran/pelatihan, penyuluhan, aksi, sosial namun hasilnya belum begitu tampak jelas sampai sekarang (Arivia, 2002)

**KESIMPULAN.**

Dengan adanya peraturan yang tetap seperti UUD 45, GBHN, Inpres dll sangat terbuka kesempatan bagi wanita untuk memanfaatkan/memperjuangkan untuk mewujudkan haknya yang sejajar dengan pria. Jadi wanita harus proaktif, jangan menunggu belas kasihan orang lain bahkan manja jika ingin berhasil perjuangannya.

Dari paparan informasi di atas diketahui variable yang paling dominan yang pada akhirnya mereka menjatuhkan pilihannya untuk menjadi wanita pekerja yang sukses sesuai kemampuan dan bidang tugasnya, sehingga penulis mencoba membuat konsep kerangka pemikiran sbb:



Penjelasan :

Golongan masyarakat yang segi ekonomi dapat dikategorikan menjadi 3 golongan, yakni masyarakat ekonomi kuat, ekonomi sedang dan ekonomi lemah. Bagi masyarakat ekonomi kuat tidak masalah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya termasuk mengeluarkan biaya pendidikan sampai yang tertinggi bagi wanita / WPT (anggota keluarga) dan motivasinya terutama untuk menjaga status sosialnya.

Golongan masyarakat ekonomi sedang dengan motivasi yang tinggi dapat membiayai wanita (WPM = Wanita Pendidikan Menengah, WPT = Wanita Pendidikan Tinggi) anggota keluarganya sehingga menghasilkan wanita yang layak mendapatkan pekerjaan yang layak pula sehingga layak/berguna bagi keluarga/masyarakat/negara.

Golongan masyarakat ekonomi lemah agak kesusahan dalam rangka untuk membiayai wanita anggota keluarganya melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi (WPT, WPM) tetapi hanya bisa membiayai wanita (WPD = Wanita Pendidikan Dasar) bahkan tidak menyekolahkan wanita anggota keluarganya (WNS = Wanita Non Sekolah).

Oleh karena itu dalam tulisan ini untuk memberikan saran bagi wanita agar dapat memanfaatkan peluang untuk memperoleh pekerjaan yang layak/berguna yang dipengaruhi oleh 4 variabel bebas yakni ; Status Sosial, Ekonomi, Keahlian dan Keluarga, sehingga nantinya dapat ditarik kesimpulan yang mana sebenarnya faktor yang banyak/paling mempengaruhi mereka, khususnya terhadap hasil pekerjaannya.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Anonim, 1989. UU RI No. 2/1989 *Tentang Sistem Pendidikan Nas*.Eko Jaya.Jkt
- , 1993. *TAP MPR RINo. II/1993. GBHN*. BP7. Jkt
- Arivia, G.2002. *Kebijakan Publik Dlm Pendidikan:"Sebuah Kritik Dg Perspektif Gender* "J.Perempuan No.23. Yayasan Jurnal Perempuan. Jkt.
- As'ad, M. 1987. *Psikologi Industri. Seri Ilmu Sumberdaya Manusia*. Liberty. Ygy.
- Azkiyah, M.2002. *Keterkaitan Pendidikan Formal Perempuan dan Dunia Pemb*. J.Perempuan No. 23. Yayasan urnal Perempuan. Jkt.
- Finlayson dan Nazroo, 1998, dalam Azkiyah, 2002. *Keterkaitan Pendidikan Formal Perempuan dan Dunia Pemb*.Yayasan Jurnal Peremp. Jkt.
- Ilhami, 1985. *Buku Pintar Wanita Menjadi Pemimpin*. Karya Anda. Sby.
- Rajab, B. 2002. *Pendidikan Sekolah dan Perubahan Kependudukan Perempuan*. J. Perempuan. Yayasan J Perempuan. Jkt.
- Santi, B.2002. *Perempuan Dlm Kitab Fikih*. Yayasan J Perempuan. Jkt.